

mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu dari sisi keorganisasian maupun kehidupan yang sangat luar biasa; dan

14. Semua nama - nama yang terlibat namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Mohon maaf atas kesalahan atau kata - kata yang kurang berkenan yang mungkin terdapat di dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi berkat dan memberikan manfaat kepada seluruh pembaca.

Terima kasih.

Tuhan Memberkati.

Bandung, Desember 2022

Chelshe Natalina Hutabarat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	11
1.4.1 Maksud Penelitian	11
1.4.2 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Kegunaan Penelitian	12
1.5.1 Kegunaan Teoritis	12
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	12
1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	13
1.6.1 Landasan Teori.....	13
1.6.2 Penelitian Terdahulu	15
1.6.3 Kerangka Pemikiran	17

1.6.3.1	Pertumbuhan Ekonomi Memiliki Hubungan Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
1.6.3.2	Tingkat Inflasi Memiliki Hubungan Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	19
1.6.3.3	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Memiliki Hubungan Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	19
1.6.4	Hipotesis.....	20
1.7	Lokasi dan Waktu Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		22
2.1	Grand Theory	22
2.2	Pertumbuhan Ekonomi.....	23
2.2.1	Definisi Pertumbuhan Ekonomi.....	23
2.2.2	Ciri - Ciri Pertumbuhan Ekonomi	24
2.2.3	Jenis - Jenis Pertumbuhan Ekonomi	25
2.2.4	Faktor - Faktor yang Mempengaruhi dan Membatasi Pertumbuhan Ekonomi	26
2.2.5	Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi	29
2.3	Tingkat Inflasi.....	30
2.3.1	Definisi Tingkat Inflasi	30
2.3.2	Ciri-Ciri Inflasi	31
2.3.3	Jenis-Jenis Inflasi	31
2.3.4	Dampak dan Cara Mengatasi Tingkat Inflasi.....	33
2.3.5	Perhitungan Tingkat Inflasi	36

2.4	Pajak.....	37
2.4.1	Definisi Pajak	37
2.4.2	Fungsi Pajak	38
2.4.3	Jenis Pajak	40
2.5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	43
2.5.1	Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	43
2.5.2	Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai	45
2.5.3	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	47
2.5.4	Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	49
2.5.5	Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan.....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		53
3.1	Objek Penelitian.....	53
3.2	Metode Penelitian	53
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	54
3.3.1	Jenis Data Penelitian	54
3.3.2	Sumber Data Penelitian	54
3.4	Populasi dan Sampel Penelitian	55
3.4.1	Populasi Penelitian	55
3.4.2	Sampel Penelitian.....	56
3.5	Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	57
3.5.1	Variabel Bebas (Independent Variable)	57
3.5.2	Variabel Terikat (Dependent Variable).....	57
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	59

3.7	Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	59
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif	60
3.7.2	Uji Asumsi.....	60
3.7.2.1	Uji Normalitas	60
3.7.3	Analisis Koefisien Korelasi Product Moment Pearson	61
3.7.4	Analisis Koefisien Korelasi Berganda	63
3.7.5	Pengujian Hipotesis	64
3.7.5.1	Uji Parsial (Uji t).....	64
3.7.5.2	Uji Simultan (Uji F)	65
3.7.5.3	Uji Koefisien Determinasi	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		68
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
4.1.1	Sejarah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I	68
4.1.2	Visi Misi dan Motto Pelayanan Kanwil DJP Jawa Barat I	71
4.1.2.1	Visi Kanwil DJP Jawa Barat I.....	71
4.1.2.2	Misi Kanwil DJP Jawa Barat I.....	71
4.1.2.3	Motto Kanwil DJP Jawa Barat I	71
4.1.3	Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kanwil DJP Jawa Barat I.....	72
4.1.3.1	Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Barat I.....	72
4.1.3.2	Tugas dan Fungsi Kanwil DJP Jawa Barat I.....	83
4.1.4	Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Barat I	84
4.1.4.1	Peta Geografis Wilayah Kerja.....	84
4.1.4.2	Unit Kerja.....	86

4.2	Hasil Pengumpulan Data Penelitian.....	87
4.2.1	Data Pertumbuhan Ekonomi	87
4.2.2	Data Tingkat Inflasi.....	88
4.2.3	Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	88
4.2.4	Data Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	89
4.3	Hasil Penelitian	90
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif	90
4.3.2	Hasil Uji Asumsi	91
4.3.2.1	Hasil Uji Normalitas	91
4.3.3	Hasil Analisis Korelasi Product Moment Pearson	94
4.3.4	Hasil Analisis Korelasi Berganda	96
4.3.5	Hasil Uji Hipotesis	97
4.3.5.1	Hasil Uji Parsial (Uji t)	97
4.3.5.2	Hasil Uji Statistik F (Simultan).....	99
4.3.5.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi	100
4.4	Pembahasan.....	101
4.4.1	Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	101
4.4.2	Hubungan Antara Tingkat Inflasi Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	103
4.4.3	Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	105

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Operasional Variabel	58
Tabel 3.2	Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R	62
Tabel 3.3	Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R	63
Tabel 4.1	Data Pertumbuhan Ekonomi Pada Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2015 - 2021	87
Tabel 4.2	Data Tingkat Inflasi Pada Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Barat I88	
Tabel 4.3	Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kanwil DJP Jawa Barat I	89
Tabel 4.4	Data Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi Dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kanwil DJP Jawa Barat I	90
Tabel 4.5	Hasil Statistik Deskriptif.....	91
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas	92
Tabel 4.7	Bentuk Transformasi Data	93
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas	94
Tabel 4.9	Hasil Uji Korelasi <i>Product Moment Pearson</i>	95
Tabel 4.10	Hasil Uji Korelasi Berganda	96
Tabel 4.11	Hasil Uji Parsial (Uji t)	98
Tabel 4.12	Hasil Uji Statistik F.....	99
Tabel 4.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	4
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I	7
Gambar 1.3 Tingkat Inflasi Di Wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I.....	8
Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Barat I.....	72
Gambar 4.2 Peta Geografis Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Barat I.....	85
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Histogram	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	114
Lampiran 2 Kartu Berita Acara Bimbingan	115
Lampiran 3 Data Penelitian.....	116
Lampiran 4 Nilai T Tabel.....	118
Lampiran 5 Nilai F Tabel	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Upaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat salah satunya dengan melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mencakup di segala bidang. Dalam hal ini yakni bidang ekonomi, mewujudkan hal tersebut memang membutuhkan dana dan biaya yang tidak sedikit. Dana pembangunan nasional tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak yang merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dan memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut **Mardiasmo** (2016:4), mengatakan bahwa peran pajak bagi negara Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Dalam fungsi anggaran, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembiayaan pembangunan nasional. Sedangkan fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber alam dan bantuan asing. Hal ini sejalan dengan pandangan **Fjeldstad** (2013) yang

dikutip langsung melalui situs resmi Kementerian Keuangan Republik (www.djkn.kemenkeu.go.id) menyatakan bahwa *“An effective tax system is considered central for sustainable development because it can mobilize the domestic revenue base as a key mechanism for developing countries to escape from aid or single natural resource dependency”*. Artinya bahwa sistem pajak yang efektif akan mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan luar dan sumber daya alam.

Penerimaan pajak di Indonesia memainkan peran yang sangat signifikan dalam keuangan negara. Hal ini dibuktikan dalam satu dasawarsa terakhir, pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi rata-rata sekitar 75%. Dalam APBN tahun 2020 penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.865.702,8 miliar atau memegang kendali sekitar 83,54% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan, 2020). Penyumbang pendapatan negara lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Dengan komposisi ini, kinerja pendapatan negara tidak terlepas dari perkembangan perekonomian global maupun domestik. Pendapatan negara dari sisi eksternal dipengaruhi oleh volume perdagangan dan harga komoditas dunia, oleh karena itu kegiatan ekonomi juga ikut berperan dalam pencapaian pendapatan negara.

Salah satu jenis pajak yang sangat potensial bagi penerimaan negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang telah disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pajak Pertambahan

Nilai merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen, serta pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu komoditi dan dipungut pada setiap tahapan produksi. Pajak Pertambahan Nilai hanya memiliki satu macam tarif untuk berbagai kelompok komoditi. Dengan begitu, pembagian beban pajak pertambahan nilai akan lebih merata karena tiap produk yang dijual dari berbagai industri dikenakan tarif pajak yang sama.

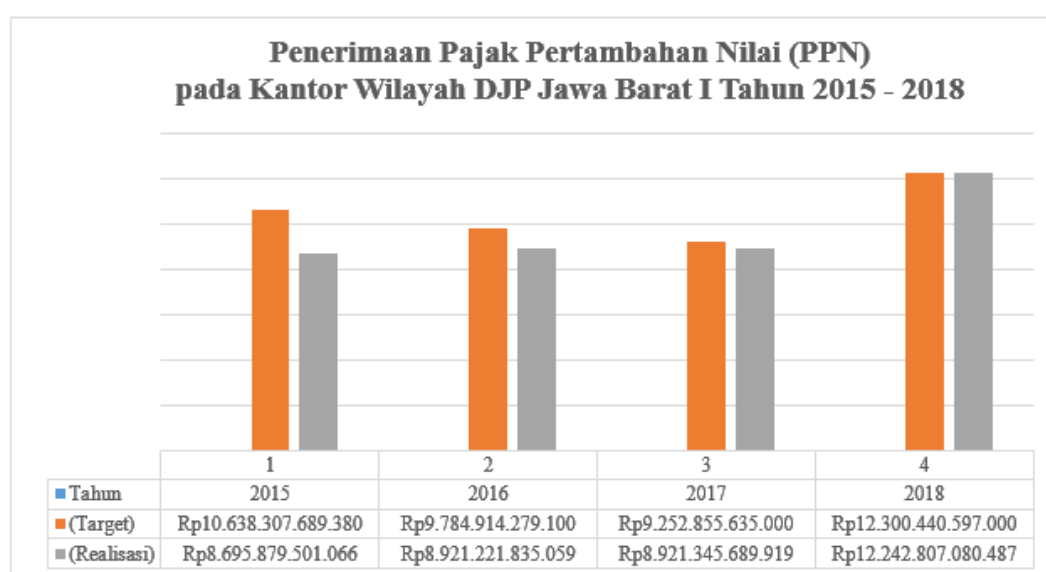
Pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selalu meningkat, agar target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tetap tercapai selama satu periode tertentu. Berbagai upaya telah dilakukan seperti membenahan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai, antara lain : membenahan pengukuhan penghasilan kena pajak (PKP), membenahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak serta berupaya dalam peningkatan impor untuk mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I memiliki wilayah kerja dengan cakupan daerah antara lain : Kota Bandung, Kota Banjar,

Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Ciamis, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Pangandaran, Kab. Purwakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang dan Kab. Tasikmalaya yang diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan menjadi salah satu daerah wisata dan juga kota industri baik jasa maupun barang. Namun besarnya peranan Pajak Pertambahan Nilai untuk membiayai pembangunan dan perekonomian rakyat belum maksimal dan tidak sesuai target, terlihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai



Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 2021, (data diolah penulis)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat jika penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan bahkan belum mampu mencapai target yang telah ditentukan. Hanya pada tahun 2018 saja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang hampir mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan data tersebut memperlihatkan jika penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I belum maksimal.

Beberapa peneliti terdahulu mencoba penelitian mengenai variabel apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Peneliti Almira Herna Renata, dkk (2016), menunjukkan hasil bahwa Inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian Desy Kurnianingsih (2017), menunjukkan hasil bahwa Inflasi berkorelasi sangat erat terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian Putu Vilia Puspitha dan Ni Luh Supadmi (2018), menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan Inflasi tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian Setiawan Junianto, dkk (2020), menunjukkan hasil bahwa Inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian Yeni Sapridawati, dkk (2021), menunjukkan hasil bahwa Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

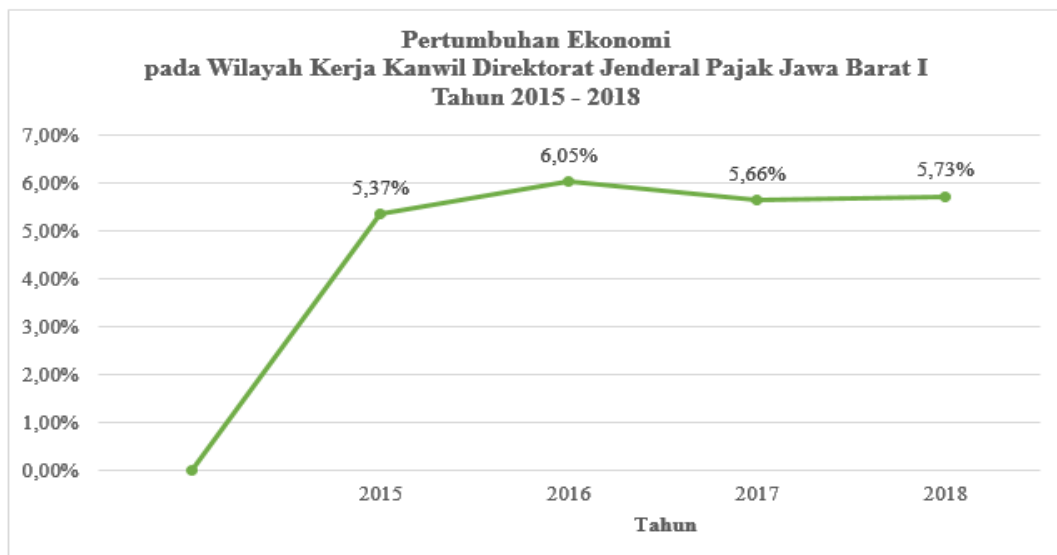
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi terdapat penelitian lain yang mengatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut peneliti memilih ingin melakukan penelitian kembali mengenai variabel ekonomi makro yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Kedua variabel tersebut digunakan karena menjadi faktor terpenting dalam ekonomi makro. Dalam Buku II Nota Keuangan beserta APBN TA (2021) upaya yang dilakukan

pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan mendorong konsumsi rumah tangga antara lain dengan memperbaiki program perlindungan sosial guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurut **Wijayanti** (2015:23), dengan kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambahnya kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berlandaskan fenomena tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan vital bagi keberlangsungan negara, maka dari itu diperlukan faktor internal dan eksternal dalam menjaga kestabilan kegiatan perekonomian agar sumber penerimaan pajak selalu terjaga dalam hal ini dimaksudkan ialah kegiatan konsumsi masyarakat yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dilansir dari (www.pajak.com) oleh Rachel Yolanda Pratiwi S, faktor internal untuk menjaga kestabilan kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan ekonomi makro suatu negara. Fluktuasi ekonomi makro dapat menimbulkan dampak buruk bagi kegiatan perekonomian suatu negara. Jika fluktuasi ekonomi terus berlangsung lama akan menurunkan daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang akan berdampak pula terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Komponen variabel ekonomi mikro yang berperan dalam hal ini seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi mempunyai keterkaitan erat dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, serta variabel tersebut merupakan data yang bersifat fluktuatif. Pernyataan ini diperkuat dengan fenomena yang terjadi selama tahun 2015 - 2018 data Pertumbuhan Ekonomi yang telah disajikan dalam bentuk gambar di bawah ini :

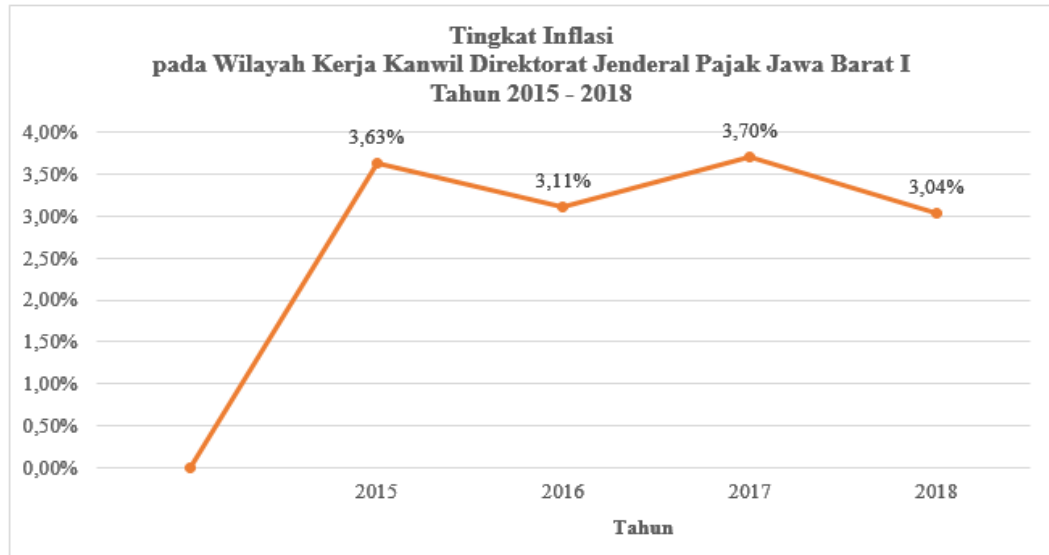
Gambar 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah penulis)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat jika diperhatikan selama tahun 2015 - 2018 pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat I mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Di tahun 2018 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (lihat gambar 1.1) mengalami kenaikan sebesar 37,23% dari tahun sebelumnya dan secara bersamaan Pertumbuhan Ekonomi juga mengalami kenaikan sebesar 0,09% dari tahun sebelumnya. Berikut ini data Tingkat Inflasi selama tahun 2015 - 2018 yang telah disajikan dalam bentuk gambar di bawah ini :

Gambar 1.3
Tingkat Inflasi Di Wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah penulis)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat jika selama tahun 2015 - 2018 Tingkat Inflasi di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat I juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Di tahun 2018 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (lihat gambar 1.1) mengalami kenaikan sebesar 37,23% dari tahun sebelumnya dan Inflasi mengalami penurunan sebesar 0,66% dari tahun sebelumnya.

Fenomena serta data yang telah ada menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi memiliki keterkaitan/hubungan erat dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Heady (2000) yang dikutip oleh Gunawan (2016), bahwa pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan penerimaan pajak. Menurut Izedonmi dan Okunbor (2014) mengutarakan pendapat, bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam satu

periode tertentu. Produk Domestik Bruto merupakan salah satu ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sadono Sukirno, 2013:17). Selain itu, komponen variabel mikro lainnya ialah inflasi, besar kecilnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh laju inflasi.

Menurut **Bank Indonesia** (2018), Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi kecuali kenaikan itu meluas yang mengakibatkan kenaikan harga. Tingkat Inflasi dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, karena jika terjadi inflasi, maka akan mempengaruhi masyarakat untuk mengurangi tingkat belanja dikarenakan harga barang-barang yang semakin naik atau dengan kata lain daya beli masyarakat semakin menurun. Indikator dalam mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen merupakan angka yang menghitung perubahan harga barang maupun jasa dengan kurun waktu yang telah ditetapkan (Karlina, 2017:20).

Penelitian ini penting dikarenakan sebagai berikut : Pertama, peran Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu sumber penerimaan pajak terbesar, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan variabel - variabel ini dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Kedua, sebagai bahan informasi tambahan kedepannya bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I. Ketiga, saran - saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya. Keempat, sebagai informasi dan pengetahuan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana hubungan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka peneliti melakukan penelitian berjudul “HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT INFLASI DENGAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kanwil DJP Jawa Barat I belum optimal dikarenakan belum mencapai atau melampaui target yang telah ditentukan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang selalu mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun dan masih di kisaran angka rata-rata 5% sedangkan keinginan pemerintah pertumbuhan ekonomi di kisaran angka 7% agar dapat mencapai target menjadi negara maju.
3. Tingkat inflasi tidak selalu stabil, mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun yakni di kisaran angka rata-rata diatas 3% sedangkan pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi di kisaran angka 1-3% agar menuju ekonomi negara yang sehat.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat adanya hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kanwil DJP Jawa Barat I pada periode 2015 - 2021?
2. Apakah terdapat adanya hubungan antara Tingkat Inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kanwil DJP Jawa Barat I pada periode 2015 - 2021?
3. Apakah terdapat adanya hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kanwil DJP Jawa Barat I pada periode 2015 - 2021?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keeratan hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kanwil DJP Jawa Barat I pada periode 2015 - 2021 yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi, agar memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Program Studi Akuntansi jenjang Pendidikan Strata Satu (S1).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berlandaskan maksud penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kanwil DJP Jawa Barat I pada periode 2015 - 2021.

2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Tingkat Inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kanwil DJP Jawa Barat I pada periode 2015 - 2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kanwil DJP Jawa Barat I pada periode 2015 - 2021.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran konsep-konsep serta teori-teori terhadap ilmu pengetahuan, dan wawasan baru bagi masyarakat untuk menjelaskan dan menggambarkan teori mengenai Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta bagi pengembang ilmu yang dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian dibidang yang sama yaitu bidang perpajakan dengan sampel dan unit analisis yang berbeda.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan memberikan input bagi instansi terkait dalam hal ini Kanwil DJP Jawa Barat I, sehingga dapat dijadikan dasar atau pertimbangan dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi guna memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat berguna secara teknis untuk memperbaiki dan

meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta mencari solusi bagi pemecahan masalah pada penelitian.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemasukan pajak yang terbesar salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut **Waluyo** (2011:9), Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri dan dikenakan pada setiap rantai produksi dan industri. Rumus dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Menurut **Sadono Sukirno** (2011:9), Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan aktivitas perekonomian yang mengakibatkan jumlah agregat barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat meningkat. Menurut **Dian & Dudi** (2016), Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Dimana pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator yang dijadikan ukuran terbaik dari kinerja perekonomian suatu negara.

Berikut rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sadono Sukirno, 2012:52) :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDB}_t - \text{PDB}_{(t-1)}}{\text{PDB}_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDB_t : Produk Domestik Bruto pada waktu tahun tertentu yang dihitung

$\text{PDB}_{(t-1)}$: Produk Domestik Bruto pada waktu tahun sebelumnya

Menurut Bank Indonesia (2015), Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, sedangkan Nicola, dkk (2016) mengutarakan inflasi yaitu kecenderungan terjadinya kenaikan harga-harga suatu barang, kenaikan bersifat umum, kegiatannya berlangsung secara terus-menerus. Menurut **Rahardja** (2004:164), indikator mengetahui inflasi selama satu periode tertentu adalah dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen merupakan angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Berikut rumus untuk menghitung inflasi (Sudono Sukirno, 2012:52) :

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{(n-1)}}{\text{IHK}_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu tahun tertentu yang dihitung

IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen pada waktu tahun sebelumnya

1.6.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat dan Bayu Kaniskha (2016)	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)	<p>Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,215 yang menunjukkan inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.</p> <p>Terhadap nilai tukar menunjukkan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -2,119 menunjukkan nilai tukar mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.</p> <p>Sedangkan jumlah PKP menunjukkan koefisien regresi bernilai positif sebesar 13,190 menunjukkan jumlah PKP mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.</p>
2	Desy Kurnianingsih (2017)	Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPN Pada Kanwil DJP Jawa Barat I	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa inflasi berkorelasi sangat erat terhadap penerimaan PPN dengan menunjukkan nilai korelasi pearson sebesar 0,981 dengan koefisien determinasi 92,20% menunjukkan bahwa 96,20% penerimaan PPN dapat dijelaskan oleh inflasi, sedangkan sisanya yaitu 3,80% penerimaan PPN</p>

			dapat dipengaruhi oleh variable-variabel lainnya.
3	Putu Vilia Puspitha dan Ni Luh Supadmi (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali)	<p>Hasil pada penelitian ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan PPN dengan menunjukkan nilai koefisien sebesar 22,501 dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.</p> <p>Sedangkan inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN dengan menunjukkan nilai koefisien 20,989 dengan signifikan sebesar $0,211 > 0,05$.</p>
4	Setiawan Junianto, Fadjar harimurti dan Suharno (2020)	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	<p>Berdasarkan hasil penelitian, inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dengan menunjukkan nilai beta sebesar 4.324.450.029,113 dan signifikansinya sebesar 0,637.</p> <p>Untuk nilai tukar mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPN dengan menunjukkan nilai beta sebesar 47.669.430,543 dan signifikansinya sebesar 0,006.</p> <p>Kemudian suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dengan</p>

			<p>menunjukkan nilai beta sebesar -4.698.427.403,242 dan signifikansinya sebesar 0,597.</p> <p>Sedangkan <i>self assessment system</i> memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPN dengan menunjukkan nilai beta sebesar 5.172.691,250 dan signifikansinya sebesar 0,000.</p>
5	Yeni Sapridawati, Novita Indrawati, Azhari Sofyan dan Zirman (2021)	Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN ditunjukkan dengan nilai t sebesar 3,954 dengan tingkat signifikansi 0,005.</p> <p>Untuk nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN dengan menunjukkan nilai t sebesar 2,804 dengan tingkat signifikansi 0,007.</p>

Sumber : Review Hasil Penelitian Terdahulu

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Menurut **Sugiyono** (2019:95), kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Peneliti akan memberikan penjelasan mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang akhirnya dapat

memberikan sebuah gambaran sejauh mana hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.6.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Memiliki Hubungan Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan aktivitas perekonomian yang mengakibatkan jumlah agregat barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat meningkat (Sadono Sukirno, 2011:9). Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan terus meningkat akan memberikan kontribusi pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan pertumbuhan yang baik akan menjamin terus terjadinya konsumsi BKP dan JKP di masyarakat (Alex dkk, 2012). Secara teori ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara bertambah karena dorongan dari pembangunan ekonomi maka akan mempengaruhi perkembangan rasio pajak. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi yakni Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu. Semakin tinggi angka PDB di suatu daerah, maka semakin tinggi pendapatan masyarakat dan semakin tinggi pula daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membayar berbagai pungutan yang telah ditetapkan pemerintah termasuk pajak. Dengan kata lain, potensi penerimaan pajak tersebut juga semakin meningkat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitha. P. V dan Supadmi. N. L, 2018) bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN.

1.6.3.2 Tingkat Inflasi Memiliki Hubungan Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

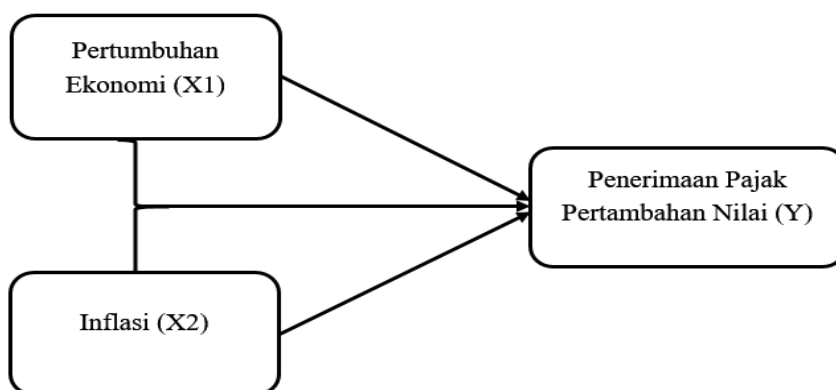
Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sadono Sukirno, 2013:14). Perkembangan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena jika inflasi naik maka akan meningkatkan harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dengan adanya inflasi tidak semata-mata berpengaruh pada kenaikan harga akan tetapi akan berimbas pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi mempengaruhi laju perekonomian negara, oleh karena itu setiap negara akan berusaha agar keuangannya tetap stabil sehingga kegiatan perekonomian masyarakat dapat berkembang. Semakin tinggi angka inflasi akan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun sehingga penerimaan pajak juga akan ikut menurun. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yeni dkk, 2021) bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

1.6.3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Memiliki Hubungan Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi merupakan variabel ekonomi makro yang menjadi salah satu faktor eksternal yang diperlukan untuk menjaga kestabilan kegiatan ekonomi negara. Upaya yang dilakukan negara untuk tetap menjaga kestabilan tersebut dengan tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi agar tetap stabil. Stabilitasnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi seharusnya akan berdampak baik kepada penerimaan pajak dikarenakan kegiatan perekonomian berjalan dengan baik.

Berikut ini merupakan gambaran mengenai kerangka pemikiran yang telah dibentuk secara sederhana untuk menjelaskan variabel - variabel dalam penelitian ini :

Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran



1.6.4 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017:69). Berlandaskan kerangka konseptual diatas, maka penulis mengajukan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut :

Hipotesis 1 (H1) : Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hipotesis 2 (H2) : Tingkat Inflasi memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hipotesis 3 (H3) : Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No. 114, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261. Peneliti mengambil data dengan cara datang langsung ke lokasi dan juga mengakses melalui <https://eriset.pajak.go.id>. Waktu penelitian dimulai pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian yaitu pada bulan November 2022 sampai dengan Februari 2023.